

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola dan mengembangkan wilayahnya. Pulau Sulawesi, terletak di tengah-tengah Indonesia dan memiliki sumber daya alam yang beragam, termasuk tambang, kehutanan, pertanian, dan perikanan. Keanekaragaman ini menciptakan peluang investasi di berbagai sektor ekonomi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan tersebut terkait dengan pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk dalam jangka panjang, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunan ekonomi mencakup peningkatan ketersediaan barang yang mendukung kebutuhan hidup, distribusi yang lebih luas, peningkatan standar hidup, serta perluasan opsi ekonomis dan sosial (Todaro dan Smith, 2011).

Menurut Basuki dan Awanis (2015) pembangunan ekonomi di negara berkembang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, menciptakan pendapatan yang merata, mengurangi disparitas antar wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperluas peluang pekerjaan. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara adalah sejauh mana pembangunan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja. Jumlah pekerjaan yang tercipta dapat

berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi melibatkan interaksi antara elemen-elemen produksi, termasuk sumber daya manusia, alam, modal, dan teknologi. Peran manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan ekonomi, karena mereka berfungsi sebagai produsen dan konsumen yang aktif dalam pelaksanaan Pembangunan. Pulau Sulawesi juga memiliki beragam tantangan ekonomi yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Masalah ekonomi yang mungkin dihadapi di Pulau Sulawesi adalah ketimpangan pembangunan antarwilayah, di mana beberapa daerah mungkin mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Faktor-faktor seperti akses terbatas terhadap infrastruktur, kurangnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, dan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya alam juga dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Pulau Sulawesi

Ketenagakerjaan memegang peranan yang sangat pokok dalam kehidupan manusia, melibatkan aspek-aspek sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang mencukupi untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja, yang tumbuh lebih cepat daripada peluang atau lapangan kerja yang tersedia. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diukur dari kemampuan untuk memberikan lapangan pekerjaan yang memadai. Permasalahan terkait peluang

kerja menjadi signifikan dalam konteks makroekonomi karena tenaga kerja merupakan unsur kunci dalam proses produksi. Masalah ketenagakerjaan juga mungkin menjadi perhatian serius.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai pembangunan ekonomi. Penyerapan Tenaga Kerja merupakan suatu jumlah kuantitas tertentu dari tenaga kerja yang digunakan oleh suatu unit usaha tertentu. Seorang muslim yang beriman dan beramal shalih dengan cara bekerja dan beribadah, maka ia adalah makhluk yang memiliki harga diri, sehingga terlepas dari hinaan orang lain seperti penghinaan jika ia meminta-meminta.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.*” (QS. Al-Bayyinah: 7)

Strategi pembangunan yang diterapkan juga akan mempengaruhi usaha perluasan kesempatan kerja. Strategi pembangunan dan sarana tujuan nasional harus benar-benar memperhatikan aspek sumber daya manusia dalam memasuki lapangan kerja, Kesempatan kerja timbul karena adanya inventasi dan usaha untuk memperluas kesempatan kerja yang ditentukan oleh laju pertumbuhan investasi.

Investasi atau penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat memberikan dorongan signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Adanya investasi yang masuk ke suatu negara secara langsung diharapkan dapat menambah kapital serta meningkatkan perekonomian di suatu negara. Menurut Laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, realisasi investasi 2022 mencapai Rp1.207

triliun, naik dari target yang ditetapkan Rp1.200 triliun. Jika investasi ke suatu daerah dapat berlangsung secara terus menerus, maka investasi akan meningkatkan penawaran melalui stok capital yang ada. Hal ini dapat meningkatkan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan output atau produksi yang memperkuat aktivitas ekonomi. Semakin tinggi akumulasi kapital maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi dan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya (Dewi & Sutrisna, 2015).

Upah Minimum Provinsi (UMP) memainkan peran penting dalam menentukan tingkat upah minimum yang harus dibayarkan kepada pekerja, yang berpotensi mempengaruhi daya tarik investasi dan tingkat penyerapan tenaga kerja. UMP merupakan standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk wilayah provinsi tertentu di Indonesia.

Penetapan upah minimum dilakukan di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten/kota. Gubernur menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) berdasarkan usulan dari Komisis Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah. Pengusaha tidak diperbolehkan untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi perusahaan yang tidak mampu untuk membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Tata cara penangguhan upah minimum diatur dalam kepmenakertrans Nomor: Kep-231/Men/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum. UMP bertujuan untuk melindungi pekerja dengan menetapkan upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Pengertian UMP menurut para ahli

mencerminkan pentingnya adanya jaminan keamanan ekonomi bagi pekerja dan keluarganya.

Setiap tahunnya upah minimum cenderung selalu mengalami peningkatan. Upah minimum juga ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pemberian upah yang lebih tinggi memberikan dampak pekerja memiliki lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Gerakan serikat pekerja, protes, dan tekanan dari masyarakat umum sering kali mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menaikkan upah minimum guna mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kenaikan upah minimum juga bisa disebabkan oleh peningkatan produktivitas di sektor-sektor tertentu. Jika produktivitas meningkat, biasanya perusahaan mampu membayar upah yang lebih tinggi kepada pekerja mereka. Kenaikan upah minimum juga harus seimbang agar tidak memberikan beban berlebihan kepada pengusaha, yang dapat mengakibatkan penurunan investasi dan penyerapan tenaga kerja, serta dapat merusak daya saing ekonomi suatu negara.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai ukuran keseluruhan dari nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah wilayah, juga dapat memberikan gambaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi dan potensi penyerapan tenaga kerja di Pulau Sulawesi. Produk domestik bruto (PDRB) adalah jumlah angka tambah dari yang dihasilkan oleh keseluruhan aktivitas produksi didalam perekonomian daerah. Faktor produk domestik regional bruto (PDRB) ialah nilai angka tambah atas barang serta jasa yang diperoleh berbagai unit produksi ataupun sektor disuatu daerah pada jangka waktu tertentu.



Sumber: BPS tahun 2013-2022, data diolah

Grafik 1. 1 Jumlah Produk Domestik Bruto Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Indonesia dalam periode 2013-2022

Berdasarkan Grafik 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 hingga 2019, PDRB selalu mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, kemudian pada 2020 jumlah PDRB Indonesia mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah 16.039.718.584 menjadi 15.764.266.548. Hal tersebut disebabkan oleh melemahnya sepuluh sektor ekonomi akibat pandemi *Covid-19*. Sehingga menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sehingga turun 2,07 persen (Tempo, 2020). Setelah mengalami pandemi *covid-19* selama dua tahun, pada tahun 2021 perlahan tingkat PDRB di Indonesia meningkat secara perlahan. Sehingga pada tahun 2021 dan 2022 PDRB di Indonesia mengalami kenaikan menjadi 19.146.749.714.

PDRB bisa mempengaruhi jumlah dari angkatan kerja agar dapat bekerja dengan asumsi apabila nilai dari PDRB meningkat, jadi nilai perolehan tambah output dari penjualan didalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Perekonomian Indonesia pada tahun 2022 mangalami kenaikan sebesar 5,31 persen, Angka tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang

mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dihitung dari PDRB atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp 19.588,4 triliun dan PDRB per kapita yang mencapai Rp 71,0 atau US\$4.783,9 (Badan Pusat Statistik, 2022).

PDRB yang tinggi menandakan adanya investasi yang besar-besaran dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu. Seiring dengan itu, akan tercipta kesempatan kerja baru di sektor-sektor yang berkembang, seperti industri manufaktur, jasa, dan teknologi. Investasi yang masif dalam infrastruktur juga dapat menciptakan lapangan kerja langsung dalam sektor konstruksi. Peningkatan jumlah angkatan kerja dimungkinkan terjadi karena beberapa faktor sistem ekonomi yang tiap tahun selalu berubah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alfin & Priana, (2022) yang berjudul “Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Invetasi, Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), Dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Tuban 2010-2020” menunjukkan bahwa Invetasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini terjadi apabila ketika invetasi mengalami peningkatan maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tuban periode 2010-2020 akan mengalami penurunan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Basuki & Ratnawati,(2023) yang berjudul “Analysis Of The Influence Of Macroeconomic Variables On Labor Arbsorbtion In Java Island” menyatakan bahwa upah minimum mempunyai dampak negatif terhadap lapangan kerja di setiap provinsi di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum mempengaruhi

lapangan kerja, apabila terjadi peningkatan upah justru akan mengurangi penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Tarman et al., (2022) yang berjudul “Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 2010-2020” menunjukkan bahwa hasil dari variabel PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB sangatlah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2010-2020. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utama et al., (2021) yang berjudul “Pengaruh Produk Domestic Regional Bruto, Upah Minimum , Inflasi, Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2020” menunjukkan bahwa PDRB secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi NTB tahun 2011-2020. Hal ini menunjukkan apabila perubahan PDRB tidak akan mempengaruhi Tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi NTB.

Analisis menyeluruh tentang hubungan antara ketiga faktor ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan untuk merancang strategi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di Pulau Sulawesi. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Investasi, Upah Minimum Provinsi, dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Sulawesi tahun 2013-2022” .

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki cangkupan yang luas sehingga menuntut peneliti untuk mempersempit masalah agar pembahasan dapat terfokus pada isu-isu yang digariskan dalam rumusan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja sebagai variable dependen dalam penelitian ini meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.
2. Terdapat 4 Variabel independent dalam penelitian ini, yaitu :
 - a. Investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan jumlah Milyar Rupiah pada setiap tahunnya.
 - b. Investasi Asing atau penanaman modal asing dengan menggunakan jumlah Milyar Rupiah pada setiap tahunnya.
 - c. Upah minimum provinsi dengan menggunakan presentase ribu rupiah pada setiap tahunnya.
 - d. Produk Domestik Regional Bruto dengan menggunakan jumlah ribu rupiah pada setiap tahunnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sulawesi?

2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sulawesi?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sulawesi?
4. Bagaimana pengaruh produk regional domestik bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sulawesi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dikemukakan tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sulawesi.
2. Untuk menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sulawesi.
3. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sulawesi.
4. Untuk menganalisis pengaruh Produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sulawesi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara praktis dan teoritis. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah Provinsi di Sulawesi, penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan informasi dan masukan bagi Lembaga-lembaga yang berkaitan dalam pembuat kebijakan yang memiliki hubungan dalam perkembangan Pembangunan dalam sektor ekonomi dan industri.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang pengetahuan, pelaksanaan Pembangunan di Pulau Sulawesi khususnya Pembangunan pada sektor ekonomi.
- b. Sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang didapatkan dalam bangku perkuliahan dan untuk membandingkan kenyataan di lapangan.
- c. Sebagai tambahan koleksi dan pengetahuan mahasiswa lain, serta sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian berikutnya.